

PENGELOLAAN POTENSI WISATA DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

Oleh:
Rio Manoppo¹

ABSTRAK

Pengelolaan potensi daerah merupakan salah satu sarana yang dapat digunakan dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun masih banyak pemerintah di daerah yang belum maksimal dalam memanfaatkan potensi yang dimiliki di daerahnya, karena minimnya pengetahuan tentang bagaimana menggali potensi daerah. Hal itu berdampak pada tidak terkelolanya potensi daerah yang sebenarnya memiliki potensi untuk dikembangkan. Salah satu potensi daerah yang paling sering dimanfaatkan oleh kebanyakan pemerintah daerah yang ada di wilayah Indonesia, adalah potensi wisata. Minahasa Tenggara merupakan salah satu wilayah yang memiliki potensi besar terkait dengan potensi wisatanya. Namun karena belum terkelola dengan maksimal, akibatnya, hasil yang sebenarnya bisa di rasakan oleh masyarakat Minahasa Tenggara, belum maksimal. Agar mendapat hasil yang maksimal diperlukan kerjasama dan kordinasi seluruh stakeholder. Memang yang paling berperan seharusnya adalah pihak yang dalam hal ini merupakan pihak yang menjadi *leading sector*, seperti Dinas Pariwisata dan Dinas Pendapatan Daerah. Temuan penelitian menggambarkan bahwa pengelolaan potensi wisata yang ada di kabupaten Minahasa Tenggara masih belum maksimal, karena koodinasi semua pihak terutama antara pihak Dinas Pariwisata dan Dinas Pendapatan Daerah belum maksimal yang berdampak pada program yang akan dijalankan.

Kata Kunci: Pengelolaan; Potensi Wisata; PAD

ABSTRACT

Management of regional potential is one of the means that can be used in an effort to increase Regional Original Income (PAD). However, there are still many governments in the regions that have not maximally exploited the potential that they have in their regions, because of the lack of knowledge on how to explore regional potential. This has an impact on the unmanaged potential of the regions that actually have the potential to be developed. One of the regional potentials that most local governments in Indonesia use is tourism potential. Southeast Minahasa is one of the regions that has great potential in relation to its tourism potential. However, because it has not been managed optimally, as a result, the results that can actually be felt by the people of Southeast Minahasa are not yet optimal. In order to get maximum results, cooperation and coordination of all stakeholders is required. Indeed, those who play the most role should be those who in this case are the leading sector, such as the Tourism Office and the Regional Revenue Service. The research findings illustrate that the management of tourism potential in Southeast Minahasa district is still not optimal, because the coordination of all parties, especially between the Tourism Office and the Regional Revenue Service, has not been maximized which has an impact on the program to be implemented.

Keywords: Management; Tourism Potential; PAD

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP UNSRAT

PENDAHULUAN

Pembangunan kepariwisataan sebagai bagian dari pembangunan nasional mempunyai tujuan antara lain, memperluas kesempatan berusaha dan memperbesar lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Sejalan dengan tahap-tahap pembangunan nasional, pelaksanaan pembangunan kepariwisataan nasional dilaksanakan secara menyeluruh, berimbang, bertahap, dan berkesinambungan. Nampak jelas bahwa pembangunan di bidang kepariwisataan mempunyai tujuan akhir untuk meningkatkan pendapatan masyarakat yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka memajukan kepariwisataan itu perlu ditingkatkan langkah-langkah terarah dan terpadu.

Obyek dan daya tarik wisata adalah suatu bentukan dari aktivitas dan fasilitas yang berhubungan, yang dapat menarik minat wisatawan atau pengunjung, untuk datang kesuatu daerah/ tempat tertentu. Daya tarik yang tidak atau belum dikembangkan, semata-mata hanya merupakan sumberdaya potensial dan belum dapat disebut sebagai daya tarik wisata, sampai adanya suatu jenis pengembangan tertentu, misalnya penyediaan aksesibilitas atau fasilitas, oleh karena itu suatu daya tarik dapat dimanfaatkan sebagai daya tarik wisata.

Saat ini media yang bis dipergunakan dalam mengembangkan potensi terutama pariwisata sudah beragam. Salah satunya bisa melalui teknologi komunikasi seperti melalui media social, yang bisa membuat objek pariwisata yang biasa saja menjadi objek pariwisata yang sangat luar biasa. Berkembangnya pariwisata di suatu daerah akan mendatangkan banyak manfaat bagi masyarakat, baik secara ekonomis, sosial, maupun budaya. Pariwisata dapat berkembang secara baik dan berkelanjutan serta mendatangkan manfaat bagi manusia, untuk meminimalisir dampak negatif yang mungkin timbul, maka pengembangan pariwisata perlu di dahului dengan kajian yang mendalam. Terutama terkait dengan sumber daya yang dimiliki. Sumber daya yang dimaksud, bisa terdiri dari sumber daya alam, sumber daya budaya, dan sumber daya manusia. Pariwisata di Indonesia sangat potensial apabila dikelola dan dikembangkan dengan baik dengan sinergitas antara swasta, pemerintah dan masyarakat.

Sebagai salah satu aspek yang berpotensi dalam meningkatkan pendapatan daerah, pariwisata harus dikembangkan dengan baik. Untuk itu perlu adanya peran dari pemerintah dalam pengelolaannya. Pengelolaan pariwisata harus merupakan pengelolaan yang terencana secara menyeluruh, sehingga dapat diperoleh manfaat yang optimal bagi masyarakat, baik dari segi ekonomi, sosial, dan kultural.

Pariwisata di Indonesia sangat besar dan menggembirakan mengingat pariwisata dianggap sebagai penyelamat, primadona penghasil devisa bagi negara. pertumbuhan sektor pariwisata di Sulawesi Utara berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Utara, mencapai 4,03% di Bulan Februari 2019, sehingga pariwisata mampu mempercepat pemerataan pembangunan daerah, membuka lapangan pekerjaan baru, meningkatkan produksi hasil kesenian dan kebudayaan.

Kepedulian dan komitmen, serta peran pemerintah dalam upaya pemberdayaan masyarakat di bidang kepariwisataan telah diatur dan tertuang dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009. Sejak adanya kebijakan tentang kepariwisataan itulah, pengembangan sector pariwisata di Indonesia mulai bermunculan. Salah satunya adalah Provinsi Sulawesi Utara yang merupakan daerah tujuan wisata. Provinsi Sulawesi Utara mencakup 15 kabupaten dan kota. Semua Kabupaten dan Kota tersebut berlomba-lomba menggali potensi lokal untuk merintis pariwisata yang berbasis budaya, alam maupun ekonomi.

Hal ini juga didukung kekayaan alam dan kearifan lokal, serta Provinsi Sulawesi Utara mampu menunjukkan eksistensi dan prestasi nasional di sector pembangunan pariwisata. Begitupun Kabupaten Minahasa Tenggara yang sedang mengembangkan potensi pariwisata, yang dikelola oleh dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Beberapa potensi yang dimiliki dan layak dikembangkan, misalnya: Pantai Lakban, Pantai Hais, Pantai Bentenan, Pantai Lumintang, objek wisata Batu Lesung dan Palau penten.

TINJAUAN KEPUSTAKAAN

• Konsep Pengelolaan

Pengelolaan Kata pengelolaan berasal dari kata kerja mengelola dan merupakan terjemahan dari bahasa Italia yaitu *menegiare* yang artinya menangani alat-alat, berasal dari

bahasa latin manus yang artinya tangan. Dalam bahasa Prancis terdapat kata mesnagement yang kemudian menjadi management. Pengelolaan dari kata kelola menurut bahasa adalah Penyelenggaraan (Poerwadarminta, 2010:30).

Menurut Balderton (dalam Adisasmita, 2011:21), istilah pengelolaan sama dengan manajemen yaitu menggerakkan, mengorganisasikan, dan mengarahkan usaha manusia untuk memanfaatkan secara efektif material dan fasilitas untuk mencapai suatu tujuan. Selanjutnya, "Pengelolaan bukan hanya melaksanakan suatu kegiatan, akan tetapi merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi fungsi-fungsi manajemen, seperti perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien." Untuk mencapai efisiensi serta efektivitas dalam manajemen, maka segala tindakan dan kegiatan baru sebaiknya dilaksanakan dengan pertimbangan dan perhitungan yang rasional. Untuk itu diperlukan langkah-langkah kegiatan dengan perumusannya secara jelas dan tegas, agar tujuan program yang dimaksudkan dapat berjalan dengan sebaik mungkin.

Pengertian manajemen menurut Handoko (2010: 18) adalah: proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumberdaya-sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Manajemen merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan, usaha-usaha para anggota organisasi dan pengguna sumber daya organisasi lainnya untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Ia menekankan bahwa manajemen dititik beratkan pada proses dan sistem. Oleh karena itu, apabila dalam sistem dan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, penganggaran, dan sistem pengawasan tidak baik, proses manajemen secara keseluruhan tidak lancar sehingga proses pencapaian tujuan akan terganggu atau mengalami kegagalan (Shyhabuddin Qalyubi, 2012: 271).

Admosudirjo (2010:160), mendefinisikan bahwa : Pengelolaan adalah pengendalian dan pemanfaatan semua faktor sumber daya yang menurut suatu perencanaan diperlukan untuk menyelesaikan suatu tujuan tertentu. Dari pengertian diatas Admosudirjo menitikberatkan pengelolaan pada proses mengendalikan dan memanfaatkan semua faktor sumber daya untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat.

Menurut George R. Terry (2016:22): "Manajemen adalah suatu proses khas yang terdiri atas tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pergerakan dan pengendalian untuk menentukan serta mencapai tujuan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya". Oleh sebab itu, George R. Terry membagi empat fungsi dasar manajemen, yaitu Planning (Perencanaan), Organizing (Pengorganisasian), Actuating (Pelaksanaan) dan Controlling (Pengawasan).

1. Perencanaan (Planning) adalah pemilihan fakta-fakta dan usaha menghubungkan fakta satu dengan lainnya, kemudian membuat perkiraan dan peramalan tentang keadaan dan perumusan tindakan untuk masa yang akan datang yang sekiranya diperlukan untuk mencapai hasil yang dikehendaki.
2. Pengorganisasian (Organizing) diartikan sebagai kegiatan mengaplikasikan seluruh kegiatan yang harus dilaksanakan antara kelompok kerja dan menetapkan wewenang tertentu serta tanggung jawab sehingga terwujud kesatuan usaha dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
3. Pergerakan (Actuating) adalah menempatkan semua anggota daripada kelompok agar bekerja secara sadar untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan perencanaan dan pola organisasi.
4. Pengawasan (Controlling) diartikan sebagai proses penentuan yang dicapai, pengukuran dan koreksi terhadap aktivitas pelaksanaan dan bilamana perlu mengambil tindakan korektif terhadap aktivitas pelaksanaan dapat berjalan menurut rencana.

• **Konsep Pariwisata**

Menurut Suwanto (2012:18), pada hakikatnya pariwisata adalah proses kepergian sementara dari seseorang atau lebih menuju tempat lain diluar tempat tinggalnya, dengan dorongan kepergiannya adalah karena berbagai kepentingan, baik karena kepentingan ekonomi, sosial, kebudayaan, politik, agama, kesehatan, maupun kepentingan lain seperti sekedar ingin tahu, menambah pengalaman ataupun untuk belajar.

Menurut WTO atau World Tourism organization (dalam Muljadi, 2010:8), pariwisata adalah aktivitas yang dilakukan orang-orang yang mengadakan perjalanan untuk dan tinggal diluar kebiasaan lingkungannya dan tidak lebih dari satu tahun berturut-turut untuk kesenangan, bisnis dan keperluan lain. Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa pariwisata adalah suatu kegiatan atau perjalanan yang dilakukan seseorang atau lebih ke suatu tempat diluar tempat tinggalnya yang dimaksudkan untuk kesenangan, menenangkan diri, kepentingan bisnis atau kepentingan-kepentingan lainnya.

Potensi wisata adalah berbagai sumber daya yang terdapat di sebuah daerah tertentu yang bisa dikembangkan menjadi daya tarik wisata. Dengan kata lain, potensi wisata adalah berbagai sumber daya yang dimiliki oleh suatu tempat dan dapat dikembangkan menjadi suatu atraksi wisata (tourist attraction) yang dimanfaatkan untuk kepentingan ekonomi dengan tetap memperhatikan aspek- aspek lainnya (Pendit, 2010).

Terdapat banyak istilah dalam kepariwisataan yang perlu dipahami pengertiannya, antara lain:

Berdasarkan pasal 1 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang pariwisata, yang dimaksud kepariwisataan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan pariwisata, artinya, kepariwisataan adalah semua kegiatan dan urusan yang berkaitan dengan perencanaan, pengaturan, pelaksanaan dan pengawasan pariwisata baik dilakukan pemerintah, swasta maupun masyarakat.

Jadi berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Pengembangan objek pariwisata merupakan suatu rangkaian upaya untuk mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan berbagai sumber daya pariwisata mengintegrasikan segala bentuk diluar pariwisata.

- **Konsep Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Halim, 2010:96). Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah berupa pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.

Pendapatan Asli Daerah adalah segala penerimaan daerah setempat yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. PAD merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah, dan salah satu sumber PAD yang memiliki kontribusi terbesar berasal dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Pajak dan retribusi daerah sebagai sumber penerimaan daerah telah dipungut di Indonesia sejak awal kemerdekaan Indonesia. Sumber penerimaan ini terus dipertahankan sampai dengan era otonomi daerah dewasa ini. Penetapan pajak dan retribusi daerah sebagai sumber penerimaan daerah ditetapkan dengan dasar hukum yang kuat, yaitu dengan undang-undang khususnya undang-undang tentang pemerintahan daerah maupun tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah.

Dengan adanya suatu otonomi tersebut dalam hal membiayai pemerintahan secara mandiri maka pemerintah daerah tentu harus berusaha semaksimal mungkin untuk mencari atau mengelola sumber penerimaan daerah termasuk didalamnya pengelolaan retribusi karena mengingat pajak dan retribusi termasuk kontribusi terbesar pada sumber pendapatan asli daerah semakin besar pemasukan hasil dari pada pajak daerah dan retribusi daerah maka semakin besar jumlah pendapatan asli daerah tersebut begitu juga sebaliknya apabila pengelolaan pajak dan retribusi di suatu daerah tidak efisien dalam pengelolaannya tentu tidak akan memberikan suatu kontribusi yang besar terhadap pendapatan asli daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah salah satu sumber dana pembiayaan pembangunan daerah pada kenyataannya belum cukup memberikan sumbangan bagi pertumbuhan daerah, hal ini mengharuskan pemerintah daerah menggali dan meningkatkan pendapatan daerah terutama sumber pendapatan asli daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai mewujudkan asas desentralisasi. (Penjelasan UU No. 33 Tahun 2004). Dalam upaya memperbesar peran pemerintah daerah dalam pembangunan, pemerintah daerah dituntut untuk lebih mandiri dalam membiayai kegiatan operasional rumah tangganya.

Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat bahwa pendapatan daerah tidak dapat dipisahkan dengan belanja daerah, karena adanya saling terkait dan merupakan satu alokasi anggaran yang disusun dan dibuat untuk melancarkan roda pemerintahan daerah. Ketentuan Pasal 6 Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah Adanya hak, wewenang, dan kewajiban yang diberikan Kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, merupakan satu upaya untuk meningkatkan peran pemerintah daerah dalam mengembangkan potensi daerahnya dengan mengelola sumber-sumber pendapatan daerah secara efisien dan efektif khususnya Pendapatan asli daerah sendiri.

- **Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah**

Adapun sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 yaitu:

1. Pendapatan asli daerah (PAD) yang terdiri dari :
 - a. Hasil pajak daerah yaitu Pungutan daerah menurut peraturan yang ditetapkan oleh daerah untuk pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum publik. Pajak daerah sebagai pungutan yang dilakukan pemerintah daerah yang hasilnya digunakan untuk pengeluaran umum yang balas jasanya tidak langsung diberikan sedang pelaksanaannya bisa dapat dipaksakan.
 - b. Hasil retribusi daerah yaitu pungutan yang telah secara sah menjadi pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik pemerintah daerah bersangkutan. Retribusi daerah mempunyai sifat-sifat yaitu pelaksanaannya bersifat ekonomis, ada imbalan langsung walau harus memenuhi persyaratan-persyaratan formil dan materiil, tetapi ada alternatif untuk mau tidak membayar, merupakan pungutan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 Pasal 10 tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah yang sifatnya budgetetairnya tidak menonjol, dalam hal-hal tertentu retribusi daerah adalah pengembalian biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi permintaan anggota masyarakat.
 - c. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Hasil perusahaan milik daerah merupakan pendapatan daerah dari keuntungan bersih perusahaan daerah yang berupa dana pembangunan daerah dan bagian untuk anggaran belanja daerah yang disetor ke kas daerah, baik perusahaan daerah yang dipisahkan, sesuai dengan motif pendirian dan pengelolaan, maka sifat perusahaan daerah adalah suatu kesatuan produksi yang bersifat menambah pendapatan daerah, member jasa, menyelenggarakan kemamfaatan umum, dan memperkembangkan perekonomian daerah.
 - d. Lain-lain pendapatan daerah yang sah ialah pendapatan-pendapatan yang tidak termasuk dalam jenis-jenis pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan dinas-dinas. Lain-lain usaha daerah yang sah mempunyai sifat yang membuka bagi pemerintah daerah untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan baik berupa materi dalam kegiatan tersebut bertujuan untuk menunjang, melapangkan, atau memantapkan suatu kebijakan daerah disuatu bidang tertentu.

2. Retribusi daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan
3. Dana perimbangan diperoleh melalui bagian pendapatan daerah dari penerimaan pajak bumi dan bangunan baik dari pedesaan, perkotaan, pertambangan sumber daya alam dan serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Dana perimbangan terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus
4. Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan daerah dari sumber lain misalnya sumbangan pihak ketiga kepada daerah yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian dengan metode kualitatif yang dimana menurut Sugiyono (2017:15) penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme yang di gunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, bersifat deskriptif dan menekankan pada proses analisis dan bersifat induktif. Hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Dalam penelitian kualitatif, data dituangkan secara deskriptif dalam bentuk laporan dan uraian. Penelitian ini yang akan memfokuskan pada bagaimana pengelolaan potensi wisata dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Tenggara dengan indikator yang di kemukakan oleh George R. Terry, yang membagi empat fungsi dasar manajemen, yaitu Planning (Perencanaan), Organizing (Pengorganisasian), Actuating (Pelaksanaan) dan Controlling (Pengawasan).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Pengertian data primer menurut Umi Narimawati, SE, M.Si (2008:98), ialah data yang berasal dari sumber asli atau pertama. Data ini harus dicari melalui narasumber atau dalam istilah teknisnya informan, yaitu orang yang kita jadikan objek penelitian atau orang yang kita jadikan sebagai sarana mendapatkan informasi ataupun data". Sedangkan data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiono : 2017:40). Data sekunder ini merupakan data yang sifatnya keperluan data primer seperti buku-buku, literatur dan bacaan yang berkaitan pengelolaan potensi wisata di Kabupaten Minahasa Tenggara.

Dalam pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya, karena penelitian ini termasuk penelitian yang bersifat deksriptif sehingga setelah data terkumpul, analisa yang dilakukan adalah analisa kualitatif. Menurut Sutopo (2016: 87- 88), analisis data ialah : "Mendeskripsikan beragam informasi (penggalan dan pengumpulan data) dilapangan yang meliputi: catatan wawancara, catatan observasi, data resmi yang berupa dokumen/arsip, memoranda seseorang yang diteliti, memo yang dibuat peneliti, komentar pengamat". Tujuan analisis data adalah menyederhanakan data ke dalam bentuk yang mudah dibaca dan diinterpretasikan. Oleh sebab itu, untuk menampilkan data yang berserakan menjadi bentuk sajian data yang utuh, menarik, penuh makna, runtut dan logis.

Menurut Miles dan Huberman (dalam Sutopo, 2016 : 128), terdapat tiga komponen pokok dalam menyusun penelitian yang bersifat kualitatif, yaitu:

- a. Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan dan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Dalam reduksi penulis diharuskan memeriksa semua data yang diperoleh secara lengkap, runtut atau masih memerlukan informasi tambahan sebagai pelengkap dalam penyusunan nantinya. Melakukan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada satu focus, membuang hal-hal yang tidak diperlukan untuk mengatur data sehingga kesimpulan penelitian dapat dilakukan.
- b. Penyajian data. Data yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data dapat diketahui kejadian dan berupa kalimatkalimat, cerita-cerita maupun tabel-tabel.

Penarikan kesimpulan hanyalah merupakan sebagian dari suatu kegiatan dan konfigurasi yang utuh. Pada bagian ini peneliti berusaha memberikan makna penuh dari data yang terkumpul dan telah diolah, sehingga membentuk satu sinopsis

utuhyang menjelaskan pokok permasalahan dari awal hingga akhir dari seluruh rangkaian penelitian ini (Sutopo, 2016: 91-93)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Dari hasil penelitian didapatkan informasi terkait program pengelolaan potensi wisata yang digulirkan oleh pemerintah, yang sasarannya diperuntukkan kepada Masyarakat kabupaten Minahasa Tenggara, dalam menunjang pariwisata yang ada di kabupaten Minahasa Tenggara, terdapat beberapa keunggulan destinasi pariwisata yang menjadi potensi dalam hal ini untuk meningkatkan jumlah pariwisata ke kabupaten Minahasa Tenggara. Dari keterangan kepala dinas kebudayaan dan pariwisata kabupaten Minahasa Tenggara, yang menyatakan bahwa:

“Pemerintah (Dinas Pariwisata dan Kebudayaan) saat ini dalam tahap Pelaksanaan program pengembangan objek wisata yang ada di kabupaten Minahasa Tenggara, bahkan beberapa tahun terakhir ini sangat dimaksimalkan. Salah satu contoh misalnya dengan dilaksanakannya festival benlak.”

Berdasarkan keterangan kepala dinas kebudayaan dan pariwisata juga diketahui program pengembangan pariwisata di kabupaten Minahasa Tenggara sedang tahap dimaksimalkan. Diketahui di kabupaten Minahasa Tenggara memiliki banyak potensi wisata, maka diharapkan agar semua objek wisata di kabupaten Minahasa Tenggara dapat memberi kontribusi secara maksimal dalam kaitannya dengan meningkatnya perekonomian dan kunjungan wisatawan.

• Program-program Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Minahasa Tenggara

Berdasarkan keterangan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata diketahui bahwa Disbudpar saat ini mempunyai beberapa program antara lain:

1. Program Pengembangan Nilai Budaya
 - Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah
 - Penatagunaan naskah kuno daerah
 - Penyusunan kebijakan tentang budaya local daerah
 - Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan nilai budaya
 - Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama dibidang budaya.
2. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
 - Fasilitas partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya
 - Pelestarian fisik dan dukungan bahan pustaka termasuk naskah kuno
 - Penyusunan kebijakan pengelolaan kekayaan budaya local daerah
 - Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah
 - Pengelolaan dan pengembangan pelatraian peninggalan sejarah purbakala
 - Pengembangan kebudayaan dan pariwisata
 - Pengembangan nilai dan geografi sejarah
 - Perekaman dan digitalisasi bahan pustaka
 - Perumusan sejarah dan purbakala
 - Pengawasan, monitoring dan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program pengelolaan kekayaan budaya
 - Pendukung pengelolaan database system informasi sejarah purbakala.
3. Program Pengelolaan Keragaman Budaya
 - Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah
 - Penyusunan system informasi dan database bidang kebudayaan
 - Penyelenggaraan dialog kebudayaan
 - Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah
 - Fasilitasi penyelenggaran festival budaya daerah
 - Seminar dalam rangka revitalisasi dan reaktualisasi budaya local

- Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan keanekaragaman budaya
- 4. Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya
 - Fasilitasi pengembangan kemitraan dengan LSM dan perusahaan swasta
 - Fasilitasi pembentukan kemitraan usaha potensi antar daerah
 - Membangun kemitraan pengelolaan kebudayaan antar daerah
 - Monitoring, evaluasi dan pelaporan
- 5. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
 - Analisa pasar untuk promosi dan pemasaran objek wisata
 - Peningkatan pemanfaatan teknologi in formasi dalam pemasaran pariwisata
 - Pengembangan jaringan kerjasama promosi wisata
 - Koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata
 - Pelaksanaan promosi pariwisata daerah di dalam dan luar negeri
 - Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan pemasaran pariwisata
 - Pengembangan statistik kepariwisataan
 - Pelatihan pemandu terpadu
- 6. Program Pengembangan Destinasi Wisata
 - Pengembangan proyek pariwisata unggulan
 - Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata
 - Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan
 - Pelaksanan koordinasi pembangunan obyek pariwisata dengan lembaga dunia usaha
 - Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan destinasi pemasaran pariwisata
 - Pengembangan daerah tujuan wisata
 - Pengembangan, sosialisasi dan penerapan serta standarnisasi kepariwisataan
- 7. Program Pengembangan Kemitraan
 - Pengembangan dan penguatan informasi dan database
 - Pengembangan dan penguatan litbang, kebudayaan dan pariwisata
 - Pengembangan SDM di bidang pariwisata dan kebudayaan bekerjasama dengan lembaga lainnya
 - Fasilitasi pembentukan forum komunikasi antar pelaku industri pariwisata dan budaya
 - Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitran pariwisata
 - Pemantauan dan evaluasi pelaksanan program peningkatan kemitran
 - Pengembangan SDM dan profesionalisme bidang pariwisata
 - Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata.

• **Potensi Destinasi Wisata Yang Ada di Kabupaten Minahasa Tenggara.**

Kabupaten Minahasa Tenggara memiliki Potensi Wisata yang sangat besar dan beragam. Potensi wisata, yang ada di wilayah ini terdiri dari potensi wisata budaya, potensi wisata alam, dan potensi wisata buatan. Berikut tabel potensi wisata yang ada di Kabupaten Minahasa Tenggara :

NO	Nama Destinasi	Wisata Budaya		Wisata Alam		Wisata Buatan		Total	Keterangan
		2019	2020	2019	2020	2019	2020		
1	Pulau Punten			✓	✓				Desa Tumbak
2	Pulau Lumintang			✓	✓				Desa Bentenan
3	Taman Laut Tumbak			✓	✓				Desa Tumbak
4	Hutan Mangrove desa tumbak			✓	✓				Desa Tumbak

5	Pantai Benteenan			✓	✓				Desa Benteenan
6	Tenun Tradisional Desa Benteenan	✓	✓						Desa Benteenan
7	Pantai Minangah			✓	✓				Desa Minangah
8	Pantai Pasir Putih desa Tumbak			✓	✓				Desa Tumbak
9	Hutan Mangrove Desa Tangesa			✓	✓				Desa Tangesan
10	Pantai Muntoi Desa Minanga			✓	✓				Desa Minanga
11	Pantai Lakban Ratatotok			✓	✓				Desa Ratatotok
12	Mesin Penumbuk Emas	✓	✓						Desa Ratatotok
13	Pulau Naga (dodokayu)			✓	✓				Desa Ratatotok
14	Pulau Hugou desa Basaan 1			✓	✓				Desa Basaan 1
15	Pantai Gemilang Desa Basaan 1			✓	✓				Desa Basaan
16	Goa Alam Desa Soyoan			✓	✓				Desa Soyoan
17	Pantai Montoi desa Ratatotok			✓	✓				Desa Ratatotok
18	Tanjung Merah Basaan			✓	✓				Desa Basaan
19	Danau Messel			✓	✓				Desa Ratatotok
20	Kebun Raya Mengawati			✓	✓				Desa Ratatotok
21	Ekowisata Hutan Mangrove			✓	✓				Desa Ratatotok
22	Pantai Hais Desa Molompar			✓	✓				Desa Molompar
23	Teluk Belang			✓	✓				Desa Belang
24	Parigi Bajo Desa Borgo	✓	✓						Desa Borgo
25	Kubur Keramat Desa Borgo	✓	✓						Desa Borgo
26	Lesung BAru Beringin	✓	✓						Desa Beringin
27	Air Terjun Watuliney			✓	✓				Desa Watuliney
28	Pulau Salim Burung			✓	✓				Desa Mangkit
29	Air Konde			✓	✓				Kelurahan Wawali
30	Wisata Tracking Gunung Potong			✓	✓				Desa Pangu
31	Wisata Agro Desa Pangu			✓	✓				Desa Pangu
32	Air Terjun Poniki			✓	✓				Desa Poniki
33	Air Terjun Makalu			✓	✓				Desa Makalu
34	Kolam Hais			✓	✓				Desa Minanga
35	Pantai Tanah Telucur Belang			✓	✓				Desa Ponosak
36	Air Terjun Tai Kere			✓	✓				Silian Satu
37	Danau Kawelaan Silian			✓	✓				Desa Silian
38	Gunung Sopotan			✓	✓				Desa Silian Raya

39	Air Panas Tepu Tonggi			✓	✓				Desa Silian Tengah
40	Air Panas Katamah/Katupang			✓	✓				Desa Silian Bawah
41	Danau Mongawo			✓	✓				Desa Liwutung
42	Kubur Raja Bantik Desa Liwutung	✓	✓						Desa Towuntu
43	Puncak Anugrah					✓	✓		Desa Esandom
44	Ranombolay Park					✓	✓		Desa Molompar
45	Puncak Keletambal			✓	✓				Desa Molompar
46	Danau Bulilin			✓	✓				Desa Betelen 1
47	Puncak Dasoloy			✓	✓				Desa Betelen
48	Danau Kuyanga			✓	✓				Desa Kuyanga
49	Danau Seledan			✓	✓				Desa Tombatu dua Barat
50	Danau Tutud			✓	✓				Desa Tombatu III
51	Lesung Batu Ratu Oki	✓	✓						Desa Kali
52	Sokong Batu	✓	✓						Desa Tombatu Satu
53	Puncak Pilar			✓	✓				Desa Tonsawang
54	Air Panas Kelewaha			✓	✓				Desa Lobu 1
55	Batu Dinding Kelehota			✓	✓				Desa Lobu II
56	Air Terjun Desa Banga			✓	✓				Desa Lobu 1
57	Air Terjun Ranoako			✓	✓				Desa Banga
58	Air Terjun Desa KAlait			✓	✓				Desa Kalait
59	Danau Kelewonang			✓	✓				Ranoketang Atas
60	Kolam Renang Senayan					✓	✓		Desa Lobu I
Jumlah		8	8	50	50	3	3	122	

Sumber: Dinas Pariwisata dan kebudayaan kabupaten Minahasa Tenggara

B. Pembahasan

• Analisis Indikator Pengelolaan Potensi Wisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa Tenggara

Kabupaten Minahasa Tenggara merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Sulawesi Utara yang memiliki 12 Kecamatan. Kabupaten ini merupakan kabupaten yang dimekarkan dari Kabupaten Minahasa Selatan. Berbagai isu pokok dalam Pembangunan ekonomi daerah Kabupaten Minahasa Tenggara yang tergambar dalam profil pembangunan provinsi Sulawesi Utara Tahun 2013 yaitu perlunya optimalisasi pembangunan lewat pengembangan komoditas unggulan serta perlunya peningkatan mutu sumber daya manusia dan kapasitas aparatur pengelolaan keuangan daerah. Hal ini menjadi gambaran tersendiri

bahwa pentingnya potensi sumberdaya alam dan keuangan daerah dalam menunjang pembangunan daerah.

Untuk melihat bagaimana pengelolaan potensi wisata yang ada di kabupaten Minahasa Tenggara, yang menjadi focus dalam penelitian ini, digunakan indicator yang dikemukakan oleh George R. Terry, yang membagi empat fungsi dasar manajemen, yaitu Planning (Perencanaan), Organizing (Pengorganisasian), Actuating (Pelaksanaan) dan Controlling (Pengawasan).

1. Perencanaan

Perencanaan meliputi pengaturan tujuan dan mencari cara bagaimana untuk mencapai tujuan tersebut. *Planning* telah dipertimbangkan sebagai fungsi utama manajemen dan meliputi segala sesuatu yang manajer kerjakan. Di dalam *planning*, manajer memperhatikan masa depan, mengatakan "Ini adalah apa yang ingin kita capai dan bagaimana kita akan melakukannya".

Membuat keputusan biasanya menjadi bagian dari perencanaan karena setiap pilihan dibuat berdasarkan proses penyelesaian setiap rencana. *Planning* penting, karena banyak berperan dalam menggerakkan fungsi manajemen yang lain. Contohnya, setiap manajer harus membuat rencana pekerjaan yang efektif di dalam kepegawaian organisasi.

Dalam perencanaan, ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan. Yaitu harus SMART : Specific (S), Measurable (M), Achievable (A), Realistic (R), Time (T). Specific artinya perencanaan harus jelas maksud maupun ruang lingkupnya. Tidak terlalu melebar dan terlalu idealis. Measurable artinya program kerja atau rencana harus dapat diukur tingkat keberhasilannya. Achievable artinya dapat dicapai. Jadi bukan anggan-angan. Realistic artinya sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang ada. Tidak terlalu mudah dan tidak terlalu sulit. Tapi tetap ada tantangan. Time artinya ada batas waktu yang jelas. Mingguan, bulanan, triwulan, semesteran atau tahunan. Sehingga mudah dinilai dan dievaluasi.

Sehubungan dengan Perencanaan yang dimiliki oleh dinas Pariwisata Kabupaten Minahasa Tenggara ini, dapat dijelaskan dari wawancara dengan kepala dinas pariwisata Minahasa Tenggara, yang mengatakan:

"jika berbicara soal perencanaan dari sektor pariwisata di kabupaten Minahasa Tenggara, itu boleh dikatakan kami lakukan dengan sangat baik karena ketika kita melihat berbagai potensi wisata yang kuat kita segera mempersiapkan peraturan, sumberdaya yang cukup. Kita harus mampu melihat peluang atau potensi dalam merencanakan untuk memajukan pariwisata yang kita miliki terlebih khusus di kabupaten Minahasa Tenggara."

Pernyataan yang sama juga dikemukakan Bidang Pemasaran dan Promosi Pariwisata Kabupaten Minahasa Tenggara bahwa :

"Terkait dengan perencanaan yang telah dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Budaya kabupaten Minahasa Tenggara dalam bidang pariwisata, kita melakukan observasi lapangan dengan instansi terkait, untuk melihat potensi-potensi apa yang dapat menjadi peluang terhadap PAD, dalam hal ini di bidang pariwisata yang ada di kabupaten Minahasa Tenggara."

Dari hasil wawancara dengan informan, terkait dengan indicator perencanaan dari sektor pariwisata di kabupaten Minahasa Tenggara, boleh dikatakan sudah baik. Karena perencanaan dilakukan secara bersama antar instansi terkait. Setelah potensi terdata segera dibuatkan peraturan yang mendukungnya. Sarana prasarana segera dipersiapkan, termasuk penyiapan sumberdaya yang cukup. Pemerintah telah mampu melihat peluang atau potensi dalam merencanakan untuk memajukan pariwisata yang dimiliki terlebih khusus di kabupaten Minahasa Tenggara. Karena perencanaan sangat menentukan hasil yang ingin dicapai dalam proses Pendapatan Asli Daerah.

2. Pengorganisasian

Organizing adalah proses dalam memastikan kebutuhan manusia dan fisik setiap sumber daya tersedia untuk menjalankan rencana dan mencapai tujuan yang berhubungan dengan organisasi. Organizing juga meliputi penugasan setiap aktifitas, membagi pekerjaan ke dalam

setiap tugas yang spesifik, dan menentukan siapa yang memiliki hak untuk mengerjakan beberapa tugas.

Aspek utama lain dari *organizing* adalah pengelompokan kegiatan ke departemen atau beberapa subdivisi lainnya. Misalnya kepegawaian, untuk memastikan bahwa sumber daya manusia diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi. Mempekerjakan orang untuk pekerjaan merupakan aktifitas kepegawaian yang khas. Kepegawaian adalah suatu aktifitas utama yang terkadang diklasifikasikan sebagai fungsi yang terpisah dari *organizing*.

Agar tujuan tercapai maka dibutuhkan pengorganisasian. Dalam organisasi biasanya diwujudkan dalam bentuk bagan organisasi. Yang kemudian dipecah menjadi berbagai jabatan. Pada setiap jabatan biasanya memiliki tugas, tanggung jawab, wewenang dan uraian jabatan (*Job Description*).

Semakin tinggi suatu jabatan biasanya semakin besar tugas, tanggung jawab dan wewenangnya. Biasanya juga semakin besar penghasilannya. Dengan pembagian tugas tersebut maka pekerjaan menjadi ringan. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Disinilah salah satu prinsip dari manajemen. Yaitu membagi-bagi tugas sesuai dengan keahliannya masing-masing.

Sehubungan dengan Pengorganisasian yang dimiliki oleh dinas Pariwisata Kabupaten Minahasa Tenggara ini, dapat dijelaskan dari hasil wawancara dengan kepala dinas pariwisata Minahasa Tenggara, yang mengatakan:

***“dalam pengorganisasian dari sektor pariwisata di kabupaten Minahasa Tenggara, itu boleh dikatakan kami melakukannya dengan baik. Pemerintah daerah dalam hal ini dinas terkait sudah bisa melaksanakan koordinasi yang baik antara pegawai dalam hal ini bidang yang menangani objek-objek wisata yang ada di Minahasa Tenggara, dan hasilnya bisa dilihat dari pendapatan asli daerah yang bisa menjadi suatu potensi besar dalam pariwisata yang ada di kabupaten Minahasa Tenggara.*”**

Pernyataan yang sama juga dikemukakan Bidang Pemasaran dan Promosi Pariwisata Kabupaten Minahasa Tenggara bahwa :

“Terkait dengan pengorganisasian yang telah dilakukan oleh dinas pariwisata dan budaya kabupaten minahasa dalam bidang pengelolaan potensi pariwisata, sesuai aturan dan kebijakan dinas pariwisata. Dalam menjalankan objek pariwisata kita melaksanakan sesuai arahan dan kebijakan pemerintahan daerah.”

Dari hasil wawancara dengan informan, dilihat dari sisi factor pengorganisasian, yang dilakukan dari Dinas Pariwisata di kabupaten Minahasa Tenggara, sudah dapat dikatakan baik. Pemerintah daerah dalam hal ini dinas terkait sudah bisa melaksanakan koordinasi yang baik antara pegawai dalam hal ini bidang yang menangani objek-objek wisata yang ada di Minahasa Tenggara, dan juga bisa dilihat dari peningkatan pendapatan asli daerah. Selain itu, hasil yang juga bisa dijadikan ukuran adalah dimana bisa menjadikan potensi wisata menjadi prioritas dari program pemerintah kabupaten Minahasa Tenggara.

3. Pelaksanaan

Perencanaan dan pengorganisasian yang baik kurang berarti bila tidak diikuti dengan pelaksanaan kerja. Untuk itu maka dibutuhkan kerja keras, kerja cerdas dan kerjasama. Semua sumber daya manusia yang ada harus dioptimalkan untuk mencapai visi, misi dan program kerja organisasi. Pelaksanaan kerja harus sejalan dengan rencana kerja yang telah disusun. Kecuali memang ada hal-hal khusus sehingga perlu dilakukan penyesuaian.

Setiap SDM harus bekerja sesuai dengan tugas, fungsi dan peran, keahlian dan kompetensi masing-masing SDM untuk mencapai visi, misi dan program kerja organisasi yang telah ditetapkan.

Sehubungan dengan indicator pelaksanaan, yang dilakukan oleh dinas Pariwisata Kabupaten Minahasa Tenggara ini, dapat dijelaskan dari wawancara dengan kepala dinas pariwisata Minahasa Tenggara, yang mengatakan:

***“Dalam pelaksanaan dari sektor pariwisata di kabupaten Minahasa Tenggara, yang telah dilakukan oleh dinas pariwisata dan kebudayaan kabupaten Minahasa Tenggara itu boleh dikatakan sangat baik dilihat dari persentase ke tahun ke tahun.*”**

Selain itu adanya peningkatan di berbagai objek wisata dan telah menunjang pendapatan asli daerah, juga sudah terlihat walaupun masih perlu ditingkatkan.

Pernyataan yang sama juga dikemukakan oleh Bidang Pemasaran dan Promosi Kabupaten Minahasa Tenggara bahwa :

"Terkait dengan pelaksanaan yang telah dilakukan oleh dinas pariwisata dan budaya kabupaten Minahasa Tenggara dalam bidang pariwisata, sesuai aturan dan kebijakan dinas pariwisata. Dalam pelaksanaan untuk menunjang pendapatan asli daerah yang dilakukan sudah optimal."

Dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan terkait dengan indikator pelaksanaan dari sektor pariwisata di kabupaten Minahasa Tenggara, sudah cukup baik. Beberapa pelaksanaan kegiatan yang telah diprogramkan, telah dilakukan oleh dinas Pariwisata Dan Kebudayaan kabupaten Minahasa Tenggara. Hal itu juga bisa dibuktikan dengan mulai terjadi peningkatan baik dari sector pariwisata, khususnya sector yang mempunyai ciri khas dari pariwisata yang ada di Minahasa Tenggara.

4. Pengawasan

Agar pekerjaan berjalan sesuai dengan visi, misi, aturan dan program kerja maka dibutuhkan pengontrolan. Baik dalam bentuk supervisi, pengawasan, inspeksi hingga audit. Kata-kata tersebut memang memiliki makna yang berbeda, tapi yang terpenting adalah bagaimana sejak dini dapat diketahui penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan maupun pengorganisasian. Sehingga dengan hal tersebut dapat segera dilakukan koreksi, antisipasi dan penyesuaian-penyesuaian sesuai dengan situasi, kondisi dan perkembangan zaman.

Sehubungan dengan pengawasan yang telah dilakukan oleh dinas Pariwisata Kabupaten Minahasa Tenggara ini, dapat dijelaskan dari wawancara penulis dengan kepala dinas pariwisata Minahasa Tenggara mengatakan:

"dalam pengawasan dari sektor pariwisata di kabupaten Minahasa Tenggara, itu boleh dikatakan sudah sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam menghindari terjadinya hal-hal yang tidak di inginkan dan juga sudah melakukan riset baik dalam pengawasan objek wisata maupun riset pendapatan asli daerah yang telah melalui rapat internal dinas pariwisata dan kebudayaan di kabupaten Minahasa Tenggara."

Pernyataan yang sama juga dikemukakan oleh Bidang Pemasaran dan Promosi Pariwisata Kabupaten Minahasa Tenggara bahwa :

"Terkait dengan pengawasan yang telah dilakukan oleh dinas pariwisata dan budaya kabupaten minahasa dalam bidang pariwisata, sudah sangat baik dan sampai sejauh ini tahap pengawasan masih tetap berlanjut dalam hal menghindari kelalaian dalam menjalankan program dan ketentuan yang telah di sepakati dan ti atur oleh dinas pariwisata dan kebudayaan kabupaten Minahasa Tenggara."

Dari hasil penelitian terlihat pengawasan dari sektor pariwisata di kabupaten Minahasa Tenggara juga sudah sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku, dalam menghindari terjadinya hal-hal yang tidak di inginkan. Hal itu bisa dilihat pada saat pelaksanaan sangat sedikit terjadi kesalahan dan pelanggaran dari ketentuan yang sudah diatur dan disepakati.

• Peran Pemerintah Kabupaten Dalam Pengelolaan Potensi Wisata Di Kabupaten Minahasa Tenggara

Terkait dengan peran pemerintah dalam mendukung sektor pariwisata di Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra) terlihat dari perhatian yang ditunjukkan oleh Pemerintah Kabupaten. Seperti yang diungkapkan oleh Bupati Minahasa Tenggara, James Sumendap:

"Sektor Pariwisata bakal menjadi andalan dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sektor pariwisata akan kami jadikan andalan. Bahkan akan menjadikan sektor ini sumber utama PAD tahun 2020," selain itu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada tahun 2020, pemerintah kabupaten (Pemkab) menyiapkan

program strategis khusus sektor pariwisata. APBD 2020 kami akan fokus untuk menunjang pariwisata. Karena ini akan dijadikan sektor unggulan meraup pendapatan. Dia mengakui, Pemkab secara serius menggarap sektor pariwisata dalam beberapa tahun terakhir, dengan menyiapkan sejumlah infrastruktur penunjang. Kami optimis, pariwisata daerah kami akan menjadi salah satu andalan di Sulawesi Utara. Karena objek wisata Minahasa Tenggara salah satu yang terbaik.”

Sementara itu Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Mitra, Sartje Tangan, mengatakan:

“tahun ini ada penataan sejumlah objek wisata unggulan. Ada lima objek wisata yang akan dilakukan penataan. Khususnya untuk menyiapkan fasilitas yang memadai bagi para wisatawan.” Kami menargetkan seluruh objek di Mitra akan menjadi destinasi unggulan daerah. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa Tenggara (Mitra) telah melihat banyak potensi wisata yang bisa diandalkan untuk dipromosikan keluar daerah Mitra. Dalam pengembangan pariwisata tentunya harus dipikirkan bagaimana suatu objek wisata dapat menarik perhatian para wisatawan yang akan berkunjung ke Mitra. Oleh karenanya, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Mitra melaksanakan pelatihan bagi para pemandu wisata khusus wisata warisan budaya, selama tiga hari di Gedung Green Garden Ratahan. Kegiatan yang dibuka oleh Sekretaris Daerah Drs Robby Ngongoloy ME., MSi tersebut, dimaksudkan agar para pemandu wisata warisan budaya bisa berpotensi, berwawasan, kreatif dan inovatif untuk memajukan pariwisata daerah dalam penyajian informasi yang menarik bagi wisatawan. Sektor pariwisata merupakan salah satu skala prioritas unggulan di Minahasa Tenggara. Karena ini bisa menjadi salah satu sektor untuk peningkatan perekonomian di Mitra. tujuan kegiatan tersebut untuk meningkatkan wawasan umum bagi pemandu wisata warisan budaya. Nanti mereka harus mampu mempromosikan pariwisata di Mitra khusus wisata budaya. Sehingga dapat menarik wisatawan datang berkunjung. Kemudian, mengajak masyarakat untuk bersama-sama mengembangkan destinasi wisata, sehingga bisa menjadi destinasi wisata terbaik di Sulut.”

Untuk dapat memberikan pelayanan dan pengalaman yang baik bagi wisatawan, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Minahasa Tenggara melakukan pembinaan kepada masyarakat, khususnya masyarakat di sekitar obyek wisata. Dengan semakin banyaknya wisatawan yang berkunjung ke obyek wisata akan semakin mendorong perekonomian dengan membuka lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar obyek wisata.

Kepala dinas juga mengungkapkan; Guna lebih mengefektifkan pembinaan tersebut, maka dibentuklah Kelompok Sadar Wisata. Dengan pembinaan yang baik dari Kelompok Sadar Wisata diharapkan masyarakat dapat berperan mewujudkan Sapta Pesona, yang meliputi:

1. Aman, merupakan suatu keadaan atau kondisi lingkungan dan suasana, dimana seseorang merasa tenteram, tidak merasa takut, terlindungi jiwa raga dan termasuk harta miliknya dan barang-barangnya.
2. Tertib, merupakan kondisi dimana suasana yang teratur, rapi, dan pelayanan dilakukan secara baik, cepat dan tepat.
3. Bersih, merupakan kondisi dimana obyek dan lingkungan wisata bebas dari sampah, kotoran, corat-coret sehingga nyaman untuk dipandang.
4. Sejuk, merupakan kondisi yang diharapkan agar mahasiswa ikut menjaga lingkungan dengan hijau, segar dan alami sehingga menumbuhkan kenangan yang baik.
5. Indah, merupakan kondisi yang menampilkan suasana secara serasi, seperti letak tata ruang dan tata bentuk alami pada obyek wisata.
6. Ramah, merupakan sikap dan perilaku seseorang yang menunjukkan keakraban, sopan dan senang membantu khususnya kepada wisatawan.
7. Kenangan, merupakan kesan yang melekat pada ingatan dan perasaan seseorang yang disebabkan pengalaman yang diperolehnya di obyek wisata.

Dengan adanya Kelompok Sadar Wisata, Dinas pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Minahasa Tenggara mengharapkan adanya suatu komunikasi timbal balik dengan para pelaku

wisata di kabupaten Minahasa Tenggara, khususnya masyarakat di sekitar obyek wisata sehingga dapat terwujud keadaan seperti yang terdapat dalam Sapta Pesona.

Selain memberikan pembinaan terhadap masyarakat, Dinas pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Minahasa Tenggara juga melakukan kegiatan promosi wisata melalui media promosi. Media yang digunakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Minahasa Tenggara dalam mempromosikan obyek wisatanya adalah dengan menggunakan media cetak, media elektronik dan promosi dan pameran wisata bersama.

Namun dari hasil penelitian, terungkap bahwa, dalam menjalankan promosi wisata, Dinas pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Minahasa Tenggara mengalami beberapa kendala, yaitu obyek wisata belum ditata dan dikelola dengan baik, termasuk belum terpenuhinya sarana dan fasilitas bagi wisatawan seperti belum adanya transportasi umum ke sejumlah obyek wisata dan belum adanya penjaga keamanan di beberapa obyek wisata. Serta kendala lain yang dihadapi adalah belum adanya bagian khusus yang menangani masalah promosi wisata dan terbatasnya dana yang dianggarkan sehingga belum dapat memaksimalkan promosi wisata secara besar-besaran.

PENUTUP

Pengelolaan potensasi wisata di Kabupaten Minahasa Tenggara, dilihat dari sisi perencanaan yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Minahasa Tenggara sudah sangat memuaskan dengan adanya peningkatan dari tahun ketahun terkait dengan Pendapatan Asli Daerah, terutama yang bersumber dari bidang pariwisata yang ada di kabupaten Minahasa Tenggara. Dari sisi, pengorganisasian yang di tunjukan oleh Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Minahasa Tenggara, jika di ukur dari efektifitas kerja yang di tunjukan baik secara kelembagaan maupun personil yang ada sudah cukup efektif. Hal ini di lihat dari meningkatnya pelayanan dan pengelolaan objek pariwisata yang di kabupaten Minahasa Tenggara. Dan terkait pelaksanaan yang di tunjukan dalam kinerja Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Minahasa Tenggara, memang di nilai cukup baik akan tetapi masih belum terlalu maksimal dalam menjalankan otoritas dan wewenang yang di miliki dalam melaksanakan dan peningkatan Pendapat Asli Daerah dalam sector pariwisata. Sedangkan, terkait engawasan, kinerja yang di tunjukan dinas pariwisata dan kebudayaan Minahasa Tenggara berdasarkan dari data-data yang di peroleh menunjukkan dalam proses pengawasan yang telah dilaksanan sampai dengan tahun ini sektor pariwisata masih dalam capaian yang efektif.

Namun, yang masih harus diperhatikan dan dilakukan terkait dengan kondisi alam dan budaya serta semangat sadar wisata masyarakat kabupaten Minahasa Tenggara, tetap harus dijaga dan dilestarikan agar pariwisata kabupaten Minahasa Tenggara tetap eksis di local maupun mancanegara. Pemerintah daerah harus menambah anggaran untuk sektor pariwisata. Pemerintah daerah harus lebih dalam menganalisis strategi yang digunakan agar dalam mencapai tujuan yang lebih maksimal dalam rangka peningkatan kualitas pariwisata yang ada. Selain itu, sumberdaya yang digunakan harus diikutkan dalam pelatihan-pelatihan tentang kepariwisataan agar dapat bekerja dengan professional dan sumber daya juga harus memperhatikan kualitasnya. Disamping perlu adanya perbaikan sarana dan prasarana dan akses menuju obojek wisata agar memudahkan para pengunjung untuk melakukan perjalanan wisatanya dan memberikan kepuasan terhadap pengunjung

DAFTAR PUSTAKA

- A. J. Muljadi, (2010). **Kepariwisataan Dan Perjalanan**. PT Rajagrafindo Persada. Jakarta.
- Adisasmita, Rahardjo. (2011). **Manajemen Pemerintah Daerah**. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu
- Atmosudirdjo, Prajudi. (2012). **Manajemen Dasar Pengertian Dan Masalah**. Malayu: Rineka Cipta.
- Abdul Halim. (2010). **Akuntansi Daerah Sektor Publik**: Jakarta : Salemba 4.
- Handoko, T. Hani. (2010). **Manajemen Personalia & Sumber daya Manusia**. BPFE-Yogyakarta
- Pendit, Nyoman. (2012). **Pariwisata Sebuah Pengantar Perdana**. Jakarta : Pradnya Paramita
- Poerwadarminta W.J.S. (2010). **Kamus Umum Bahasa Indonesia**, PN Balai Pustaka, Jakarta.

- Qalyubi, Sihabuddin. (2013). **Dasar-Dasar Ilmu Perpustakaan Dan Informasi**. Yogya: Jurusan Ilmu Perpustakaan Dan Informasi, UIN Sunan Kaijaga
- Sugiyono, (2017). **Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D**, Bandung : Alfabeta.
- Sutopo. (2016). **Metodologi Penelitian Kualitatif**. Surakarta: UNS.
- Suwantoro, Gamal. (2010). **Dasar-Dasar Pariwisata**. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Terry, George, R. & Lesli W Rue. (2016). **Dasar-Dasar Manajemen**, diterjemahkan oleh G.A Ticoalu. – Cet. 11 -. Jakarta: Bumi Angkasa.
- Umi Narimawati, SE., M.Si. (2008). **Metodologi Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif : Teori Dan Aplikasi**, Bandung.

Sumber- Sumber Lain:

- Undang-Undang No 17 Tahun 2003 Tentang *Keuangan Negara*,
- Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 *Tentang Kepariwisata*
- Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang *Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat Dan Daerah*
- Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 *Tentang Pemerintahan Daerah*